



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2025
S/D TRIWULAN 1

APBD : APBD Murni

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (persen)	100,00	27,50	27,50	SANGAT RENDAH	Pada sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor terjadi kendala pada pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga capaiannya hanya mencapai 77 %	Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan target dan anggaran kas yang tersedia	
	2.11.02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Program Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang Berkualitas adalah 100% pada Triwulan IV Pada Triwulan I, tahapan adalah pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLHS	Triwulan II, tahapan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLHS dan pelaksanaan pemantauan evaluasi KLHS	
	2.11.03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Persen)	71,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan pada triwulan I, karena adanya perubahan anggaran (efisiensi) sehingga pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan II, dan ekatalog versi 6 masih belum dapat diproses	Persiapan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II dengan mempersiapkan kelengkapan pengadaan alat Passive Sampler dan dokumen kontrak pengujian kualitas air sungai dan laut	
	2.11.04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
					Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Persen)	14,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada target pada triwulan I namun pada triwulan I telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota terkait perhitungan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	Persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target triwulan II	
	2.11.05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
					Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I untuk progam ini adal 0 (nol). Namun Triwulan I ini telah dilakukan Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan terdapat pembinaan pengelolaan limbah B3. namun terdapat efesiensi pada perjalanan dinas sebanyak 50 persen. sehingga pembinaan pengelolaan limbah B3 kurang optimal	akan dilakukan coaching clinic pengelolaan limbah B3 pada triwulan II, walaupun ada efesiensi perjalanan dinas 50 Persen. tetapi bimtek coaching clinic tidak terkena efesiensi anggaran	
	2.11.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
					Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 90 % pada Triwulan IV Pada Triwulan I telah dilaksanakan pengawasan penataan lingkungan hidup kepada 11 usaha dan/atau kegiatan.	langkah awal yang diambil adalah melakukan pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan pada Triwulan II secara optimal	
	2.11.07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								
					Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (Persen)	11,76	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol), namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan verifikasi proposal dan Koordinasi awal dengan MHA	Tindak lanjut yang akan dilakukan di triwulan II yaitu pelaksanaan Sosialisasi dan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan ke MHA	
	2.11.08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
					Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol), namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan rapat bulanan rutin bidang membahas pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Tindak lanjut yang akan dilakukan di triwulan II yaitu pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup dalam rangka Peringatan Hari LH Tahun 2025	
	2.11.09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
					Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaga/7)	68,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol), namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan pemberian sertifikat penghargaan adiwiyata tahun 2024 dan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kanwil Kemendag terkait Penilaian Adiwiyata tahun 2025	Pada Triwulan II akan dilakukan kegiatan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2025	
	2.11.10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100 % pada Triwulan IV Pada Triwulan I, telah diselesaikan 5 pengaduan.	Langkah awal yang diambil adalah penyelesaian pengaduan secara optimal, pengaduan yang belum tertangani dilakukan pemetaan dan klasifikasi berdasarkan urgensi, lokasi, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.	
	2.11.11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
					Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I untuk progam ini adal 2 rapat kegiatan. triwulan I ini telah dilakukan Bimtek Pengisian Data Sistem informasi Pengelolaan Sampah Nasional dan Rapat IKPS (Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) dengan peserta dari kab/kota. namun berdasarkan hasil rapat, masih ada beberapa kab/kota yang belum melengkapi data di SIPSN	akan dilakuan rapat IKPS di triwulan II. data tersebut di ambil dari SIPSN	
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (Persen)	25,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Trwulan I untuk Program ini adalah 0 (nol). Namun untuk mendukung ketercapaian Program Pengelolaan Hutan telah dilaksanakan Konsultasi, koordinasi dan monitoring di setiap kegiatan terkait dengan Pengelolaan Hutan. selainitu telah dilaksanakan juga Rapat persiapan untuk Penyusunan Reencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnTL) Lingkup Provinsi Banten dan rapat Fasilitasi Tindak Lanjut untuk Penyelesaian Penguadaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kab. Lebak	Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan target dan anggaran kas yang tersedia	
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun (Persen)	28,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	triwulan satu persiapan, target kinerja pada triwulan 2,3 dan 4	rencana kegiatan triwulan 2 : 1. pembinaan masyarakat pengelolaan daerah penyangga dikawasan bernilai ekosistem penting di kab.Serang, Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang 2. pemberian bibit kepada kelompok masyarakat 3. monitoring dan evaluasi	
	3.28.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
					Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok)	52,00	2,00	3,85	SANGAT RENDAH	Sampai dengan Triwulan 1, sudah terealisasi kegiatan monitoring dan pembinaan kepada 2 kelompok masyarakat, sesuai dengan target pada triwulan 1. Kelompok tersebut adalah KTH Wana Lestari di Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak dan Kelompok Mangrove Segara Biru di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.	Untuk target triwulan 2 sebanyak 30 kelompok, kami akan melakukan kegiatan pembinaan terhadap kelompok tani hutan berupa kegiatan bimtek dan pemberian bantuan bibit, serta akan dilaksanakan bimtek bagi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat.	
	3.28.06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
					Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun (Persen)	20,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Realisasi program Pengelolaan Derah Aliran Sungai (DAS) baru dapat dihitung pada Triwulan IV, karena merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pada program pengelolaan DAS. Dimana Pada Triwulan I kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat persiapan pelaksanaan sub kegiatan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS serta kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2025.	Adapun untuk Triwulan II akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu : Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kegiatan pengelolaan DAS pada Bulan April (Kabupaten Lebak), Bulan Mei (Kabupaten Pandeglang) dan pada Bulan Mei (Kabupaten Serang) serta Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS pada Bulan Mei. untuk perhitungan realisasi program tetap baru dapat dihitung pada triwulan IV	
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	10,00	10,00	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan kegiatan triwulan I sudah dilaksanakan sesuai rencana angkas akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung kedalam LRA.	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP	
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang (Ha)	2.500,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	- Terdapat Aktifitas pada Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat yang diefesiensi/tidak dilaksanakan Sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL Tahun 2025	- berkoordinasi dengan Perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov Banten - Menyesuaikan Target capaian kegiatan dan Sub Kegiatan melalui Pergeseran Anggaran 2025	
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Kelompok)	12,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	- Terdapat Aktifitas pada Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi yang diefesiensi/tidak dilaksanakan Sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL Tahun 2025	- berkoordinasi dengan Perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov Banten - Menyesuaikan Target capaian kegiatan dan Sub Kegiatan melalui Pergeseran Anggaran 2025	
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	16,86	16,86	SANGAT RENDAH	LRA tidak sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan	Realisasisesuai dengan anggaran kas dan melakukan koordinasi dengan bidang keuangan DLHK Provinsi Banten	
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi seluas 2.500 Hektar pertahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Ha)	2.500,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	1. Target triwulan I untuk program pengelolaan hutan adalah 0 (nol), tetapi dalam triwulan I sudah dilaksanakan kegiatan survei calon lokasi untuk kegiatan KBD, pemeliharaan sumber mata air, pembangunan hutan rakyat, rehabilitasi mangrove dan KBD Mangrove. 2. Terdapat aktifitas kegiatan pada sub kegiatan Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara dan sub kegiatan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan yang di efisiensi sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL TA. 2025	1. Koordinasi dengan perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov. Banten 2. Menyesuaikan target capaian kegiatan dan sub kegiatan melalui pergeseran anggaran 2025	
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon (Kelompok)	12,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Anggaran di geser ke Triwulan IV sesuai arahan peneliti	Mengikuti arahan peneliti	
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Laboratorium Lingkungan										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	12,83	12,83	SANGAT RENDAH	Keg Adum Perangkat Daerah pada TW I Instalasi Listrik/Penerangan (triwulan I 1 paket) Perlengkapan Kantor (triwulan I 3 paket) Logistik Kantor (triwulan I 1 paket) Koordinasi dan Konsultasi SKPD (triwulan I 2 laporan) Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (triwulan I 3 unit) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (triwulan I 19 unit)	Triwulan II yang dilaksanakan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Kalibrasi Alat-alat Laboratorium, Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	2.11.03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan (Persen)	22,50	6,59	29,29	SANGAT RENDAH	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator program persentase peningkatan fungsi laboratorium lingkungan, pada triwulan I : - Pengambilan contoh uji yang telah dilakukan pada triwulan I sebanyak 39 paket dengan target tahun 2025 sebanyak 124 paket. - Sosialisasi Pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan dengan mengundang Instansi Kab/Kota, melakukan pembayaran registrasi iuran tahunan keanggotaan	Triwulan II dilaksanakan : - Pengambilan sampel triwulan II sebanyak - Sosialisasi pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan pada pelaku usaha / dan atau Kegiatan - pelaksanaan rapat audit internal sebagai persiapan surveillance yang akan datang - Pembelian bahan Kimia - koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Surveillance	
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	27,51	27,51	SANGAT RENDAH	Target program di TW I sebesar 27.51 dan tercapai 27.51. Pada TW I telah dilaksanakan pembayaran listrik internet, pengadaan ATK , peralatan listrik, pembelian BBM, rapat/rapat koordinasi konsultasi dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (1 unit)	Pelaksanaan pada Realisasi TW I pada Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah dilaksanakan, namun realisasi anggaran belum seluruhnya masuk dalam LRA karena terkendala sistem di keuangan, sehingga koordinasi terus dilakukan dengan bagian keuangan. Pada TW II akan dilakukan percepatan kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 2 (3 unit), roda 4 (1 unit) dan pemeliharaan AC/komputer.	
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	target 90% jumlah bibit tanaman bersertifikat untuk rehabilitasi lahan yang dibagikan ke masyarakat baru akan dihitung di akhir tahun. Pd TW I telah dilaksanakan pemeliharaan bibit tanaman rutin di persemaian, green house dan kultur jaringan, serta telah dilaksanakan monitoring distribusi bibit.	Distribusi bibit tetap berlangsung dan akan dihitung di akhir tahun persentase bibit yang terdistribusikan., pada Triwulan II akan dilaksanakan percepatan pengambilan bibit bantuan dari BPDASHL	
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	1,03	1,03	SANGAT RENDAH	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai Rencana Angkas akan tetapi belum terhitung kedalam LRA, dan Kegiatan Pemeliharaan BMD dan Keg Pengadaan BMD salah satu kegiatan yang terkena Efisiensi sehingga di triwulan I sebagian kegiatan belum bisa dilaksanakan.	Koordinasi dengan Sub Bagian PEP	
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten										
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Persentase Pengelolaan TAHURA Banten (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pada triwulan 1 telah dilaksanakan rapat-rapat persiapan, koordinasi dan konsultasi, persiapan lahan dan media tanam, serta patroli pengamanan kawasan Tahura Banten	Pada triwulan 2 melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah disusun.	

SERANG,Maret 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

WAWAN GUNAWAN.Sos. M.Si
NIP.196712171988031006



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

TAHUN ANGGARAN 2025

S/D TRIWULAN 1

APBD : APBD Murni

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (persen)	100,00	27,50	27,50	SANGAT RENDAH	Pada sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor terjadi kendala pada pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga capaiannya hanya mencapai 77 %	Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan target dan anggaran kas yang tersedia	
	2.11.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	9,63	9,63				
	2.11.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	31,99	31,99				
	2.11.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	9,55	9,55				
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	19,34	19,34				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	1,40	1,40				
	2.11.02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Program Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang Berkualitas adalah 100% pada Triwulan IV Pada Triwulan I, tahapan adalah pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLHS	Triwulan II, tahapan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLHS dan pelaksanaan pemantauan evaluasi KLHS	
	2.11.02.1.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (Dokumen)	2,00	7,27	363,71				
	2.11.03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Persen)	71,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan pada triwulan I, karena adanya perubahan anggaran (efisiensi) sehingga pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan II, dan ekatalog versi 6 masih belum dapat diproses	Persiapan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II dengan mempersiapkan kelengkapan pengadaan alat Passive Sampler dan dokumen kontrak pengujian kualitas air sungai dan laut	
	2.11.03.1.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (dokumen)	3,00	2,65	88,20				
	2.11.04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
					Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Persen)	14,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada target pada triwulan I namun pada triwulan I telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota terkait perhitungan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	Persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target triwulan II	
	2.11.04.1.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi (persen)	100,00	13,53	13,53				
	2.11.05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
					Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I untuk progam ini adal 0 (nol). Namun Triwulan I ini telah dilakanakan Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan terdapat pembinaan pengelolaan limbah B3. namun terdapat efesiensi pada perjalanan dinas sebanyak 50 persen. sehingga pembinaan pengelolaan limbah B3 kurang optimal	akan dilakukan coaching klinik pengelolaan limbah B3 pada triwulan II, walaupun ada efesiensi perjalanan dinas 50 Persen. tetapi bimtek coaching klinik tidak terkena efesiensi anggaran	
	2.11.05.1.01			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (dokumen)	2,00	4,20	210,00				
	2.11.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
					Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 90 % pada Triwulan IV Pada Triwulan I telah dilaksanakan pengawasan penaatan lingkungan hidup kepada 11 usaha dan/atau kegiatan.	langkah awal yang diambil adalah melakukan pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan pada Triwulan II secara optimal	
	2.11.06.1.01			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	9,27	9,27				
	2.11.07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								
					Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (Persen)	11,76	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol). namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan verifikasi proposal dan Koordinasi awal dengan MHA	Tindak lanjut yang akan dilakukan di triwulan II yaitu pelaksanaan Sosialisasi dan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan ke MHA	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.11.07.1.02			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampinga (lembaga)	4,00	0,00	0,00				
	2.11.08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
					Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol), namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan rapat bulanan rutin bidang membahas pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Tindak lanjut yang akan dilakukan di triwulan II yaitu pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup dalam rangka Peringatan Hari LH Tahun 2025	
	2.11.08.1.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	2.11.09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
					Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaga/7)	68,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol), namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan pemberian sertifikat penghargaan adiwiyata tahun 2024 dan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kanwil Kemendag terkait Penilaian Adiwiyata tahun 2025	Pada Triwulan II akan dilakukan kegiatan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2025	
	2.11.09.1.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Lembaga/)	68,00	0,00	0,00				
	2.11.10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100 % pada Triwulan IV Pada Triwulan I, telah diselesaikan 5 pengaduan.	Langkah awal yang diambil adalah penyelesaian pengaduan secara optimal, pengaduan yang belum tertangani dilakukan pemetaan dan klasifikasi berdasarkan urgensi, lokasi, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.	
	2.11.10.1.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (Persen)	100,00	5,94	5,94				
	2.11.11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
					Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I untuk progam ini adal 2 rapat kegiatan. triwulan I ini telah dilakukan Bimtek Pengisian Data Sistem informasi Pengelolaan Sampah Nasional dan Rapat IKPS (Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) dengan peserta dari kab/kota. namun berdasarkan hasil rapat, masih ada beberapa kab/kota yang belum melengkapi data di SIPSN	akan dilakuan rapat IKPS di triwulan II. data tersebut di ambil dari SIPSN	
	2.11.11.1.01			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Persen)	100,00	2,84	2,84				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (Persen)	25,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Trwulan I untuk Program ini adalah 0 (nol). Namun untuk mendukung ketercapaian Program Pengelolaan Hutan telah dilaksanakan Konsultasi, koordinasi dan monitoring di setiap kegiatan terkait dengan Pengelolaan Hutan. selainitu telah dilaksanakan juga Rapat persiapan untuk Penyusunan Reencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnTL) Lingkup Provinsi Banten dan rapat Fasilitasi Tindak Lanjut untuk Penyelesaian Penguadaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kab. Lebak	Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan target dan anggaran kas yang tersedia	
	3.28.03.1.02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (dokumen)	2,00	13,02	651,09				
	3.28.03.1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (dokumen)	1,00	5,67	567,00				
	3.28.03.1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya dokumen rencana Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Persen)	1,00	11,29	1.129,00				
	3.28.03.1.06			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi (Unit)	19,00	1,12	5,92				
	3.28.03.1.07			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Per (Unit)	2,00	0,39	19,68				
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun (Persen)	28,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	triwulan satu persiapan, target kinerja pada triwulan 2,3 dan 4	rencana kegiatan triwulan 2 : 1. pembinaan masyarakat pengelolaan daerah penyangga kawasan bernilai ekosistem penting di kab.Serang, Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang 2. pemberian bibit kepada kelompok masyarakat 3. monitoring dan evaluasi	
	3.28.04.1.03			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Persen)	100,00	0,96	0,96				
	3.28.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
					Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok)	52,00	2,00	3,85	SANGAT RENDAH	Sampai dengan Triwulan 1, sudah terealisasi kegiatan monitoring dan pembinaan kepada 2 kelompok masyarakat, sesuai dengan target pada triwulan 1. Kelompok tersebut adalah KTH Wana Lestari di Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak dan Kelompok Mangrove Segara Biru di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.	Untuk target triwulan 2 sebanyak 30 kelompok, kami akan melakukan kegiatan pembinaan terhadap kelompok tani hutan berupa kegiatan bimtek dan pemberian bantuan bibit, serta akan dilaksanakan bimtek bagi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.28.05.1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Persen)	100,00	1,06	1,06				
	3.28.06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
					Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun (Persen)	20,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Realisasi program Pengelolaan Derah Aliran Sungai (DAS) baru dapat dihitung pada Triwulan IV, karena merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pada program pengelolaan DAS. Dimana Pada Triwulan I kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat persiapan pelaksanaan sub kegiatan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS serta kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2025.	Adapun untuk Triwulan II akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu : Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kegiatan pengelolaan DAS pada Bulan April (Kabupaten Lebak), Bulan Mei (Kabupaten Pandeglang) dan pada Bulan Mei (Kabupaten Serang) serta Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS pada Bulan Mei. untuk perhitungan realisasi program tetap baru dapat dihitung pada triwulan IV	
	3.28.06.1.01			Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	1,08	1,08				
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	10,00	10,00	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan kegiatan triwulan I sudah dilaksanakan sesuai rencana angkas akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung kedalam LRA.	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerahpada CDLHK Lebak Tangerang (Persen)	100,00	9,30	9,30				
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (Persen)	100,00	75,66	75,66				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (persen)	100,00	96,66	96,66				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang (Ha)	2.500,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	- Terdapat Aktifitas pada Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat yang defiesiensi/tidak dilaksanakan Sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL Tahun 2025	- berkoordinasi dengan Perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov Banten - Menyesuaikan Target capaian kegiatan dan Sub Kegiatan melalui Pergeseran Anggaran 2025	
	3.28.03.1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT) (Persen)	100,00	1,33	1,33				
	3.28.03.1.07			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)	1,00	5,00	500,00				
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Kelompok)	12,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	- Terdapat Aktifitas pada Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi yang defiesiensi/tidak dilaksanakan Sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL Tahun 2025	- berkoordinasi dengan Perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov Banten - Menyesuaikan Target capaian kegiatan dan Sub Kegiatan melalui Pergeseran Anggaran 2025	
	3.28.04.1.02			Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Le (Laporan)	1,00	5,50	550,00				
	3.28.04.1.03			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT) (Persen)	100,00	3,27	3,27				
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	16,86	16,86	SANGAT RENDAH	LRA tidak sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan	Realisasisesuai dengan anggaran kas dan melakukan koordinasi dengan bidang keuangan DLHK Provinsi Banten	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon (Persen)	100,00	14,76	14,76				
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC (Persen)	100,00	16,30	16,30				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC (Persen)	100,00	13,95	13,95				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi seluas 2.500 Hektar pertahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Ha)	2.500,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	1. Target triwulan I untuk program pengelolaan hutan adalah 0 (nol), tetapi dalam triwulan I sudah dilaksanakan kegiatan survei calon lokasi untuk kegiatan KBD, pemeliharaan sumber mata air, pembangunan hutan rakyat, rehabilitasi mangrove dan KBD Mangrove. 2. Terdapat aktifitas kegiatan pada sub kegiatan Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara dan sub kegiatan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan yang di efisiensi sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL TA. 2025	1. Koordinasi dengan perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov. Banten 2. Menyesuaikan target capaian kegiatan dan sub kegiatan melalui pergeseran anggaran 2025	
	3.28.03.1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC) (Persen)	100,00	0,98	0,98				
	3.28.03.1.07			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon (Kelompok)	12,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Anggaran di geser ke Triwulan IV sesuai arahan peneliti	Mengikuti arahan peneliti	
	3.28.04.1.02			Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pa (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.03			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC) (Persen)	100,00	0,00	0,00				
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Laboratorium Lingkungan										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	12,83	12,83	SANGAT RENDAH	Keg Adum Perangkat Daerah pada TW I Instalasi Listrik/Penerangan (triwulan I 1 paket) Perlengkapan Kantor (triwulan I 3 paket) Logistik Kantor (triwulan I 1 paket) Koordinasi dan Konsultasi SKPD (triwulan I 2 laporan) Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (triwulan I 3 unit) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (triwulan I 19 unit)	Triwulan II yang dilaksanakan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Kalibrasi Alat-alat Laboratorium, Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Lab Lingkungan (Persen)	100,00	16,55	16,55				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan (Persen)	100,00	6,01	6,01				
	2.11.03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan (Persen)	22,50	6,59	29,29	SANGAT RENDAH	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator program persentase peningkatan fungsi laboratorium lingkungan, pada triwulan I : - Pengambilan contoh uji yang telah dilakukan pada triwulan I sebanyak 39 paket dengan target tahun 2025 sebanyak 124 paket. - Sosialisasi Pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan dengan mengundang Instansi Kab/Kota, melakukan pembayaran registrasi iuran tahunan keanggotaan	Triwulan II dilaksanakan : - Pengambilan sampel triwulan II sebanyak - Sosialisasi pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan pada pelaku usaha / dan atau Kegiatan - pelaksanaan rapat audit internal sebagai persiapan surveillence yang akan datang - Pembelian bahan Kimia - koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Surveilence	
	2.11.03.1.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan (Dokuman)	2,00	4,58	229,10				
	2.11.03.1.02			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten (Dokumen)	2,00	16,03	801,50				
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	27,51	27,51	SANGAT RENDAH	Target program di TW I sebesar 27,51 dan tercapai 27,51. Pada TW I telah dilaksanakan pembayaran listrik internet, pengadaan ATK , peralatan listrik, pembelian BBM, rapat/rapat koordinasi konsultasi dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (1 unit)	Pelaksanaan pada Realisasi TW I pada Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah dilaksanakan, namun realisasi anggaran belum seluruhnya masuk dalam LRA karena terkendala sistem di keuangan, sehingga koordinasi terus dilakukan dengan bagian keuangan. Pada TW II akan dilakukan percepatan kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 2 (3 unit), roda 4 (1 unit) dan pemeliharaan AC/komputer.	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	18,44	18,44				
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada (UPTD SPTH) (Persen)	100,00	25,82	25,82				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	3,59	3,59				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	target 90% jumlah bibit tanaman bersertifikat untuk rehabilitasi lahan yang dibagikan ke masyarakat baru akan dihitung di akhir tahun. Pd TW I telah dilaksanakan pemeliharaan bibit tanaman rutin di persemaian, green house dan kultur jaringan, serta telah dilaksanakan monitoring distribusi bibit.	Distribusi bibit tetap berlangsung dan akan dihitung di akhir tahun persentase bibit yang terdistribusikan., pada Triwulan II akan dilaksanakan percepatan pengambilan bibit bantuan dari BPDASHL	
	3.28.03.1.09			Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (Persen)	100,00	3,09	3,09				
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	1,03	1,03	SANGAT RENDAH	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai Rencana Angkas akan tetapi belum terhitung kedalam LRA. dan Kegiatan Pemeliharaan BMD dan Keg Pengadaan BMD salah satu kegiatan yang terkena Efisiensi sehingga di triwulan I sebagian kegiatan belum bisa dilaksanakan.	Koordinasi dengan Sub Bagian PEP	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten (Persen)	100,00	10,46	10,46				
	2.11.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten) (Persen)	100,00	11,11	11,11				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	1,19	1,19				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten										
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Persentase Pengelolaan TAHURA Banten (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pada triwulan 1 telah dilaksanakan rapat-rapat persiapan, koordinasi dan konsultasi, persiapan lahan dan media tanam, serta patroli pengamanan kawasan Tahura Banten	Pada triwulan 2 melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah disusun.	
	3.28.04.1.01			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (Persen)	100,00	8,98	8,98				

SERANG,Maret 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

WAWAN GUNAWAN,Sos, M.Si
NIP.196712171988031006



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

TAHUN ANGGARAN 2025

S/D TRIWULAN 1

APBD : APBD Murni

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (persen)	100,00	27,50	27,50	SANGAT RENDAH	Pada sub kegiatan jasa pelayanan umum kantor terjadi kendala pada pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga capaiannya hanya mencapai 77 %	Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan target dan anggaran kas yang tersedia	
	2.11.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	9,63	9,63				
	2.11.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.01.0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (Laporan)	16,00	2,00	12,50				
	2.11.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	14,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.01.0009			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita)	3,00	1,00	33,33				
	2.11.01.1.01.0011			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100,00	31,99	31,99				
	2.11.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12,00	2,00	16,67				
	2.11.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	100,00				
	2.11.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1,00	1,00	100,00				
	2.11.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyalpan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	9,55	9,55				
	2.11.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6,00	1,00	16,67				
	2.11.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6,00	1,00	16,67				
	2.11.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10,00	2,00	20,00				
	2.11.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3,00	1,00	33,33				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	19,34	19,34				
	2.11.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	1,40	1,40				
	2.11.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	28,00	3,00	10,71				
	2.11.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20,00	6,00	30,00				
	2.11.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6,00	0,00	0,00				
	2.11.02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Program Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang Berkualitas adalah 100% pada Triwulan IV Pada Triwulan I, tahapan adalah pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLHS	Triwulan II, tahapan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KLHS dan pelaksanaan pemantauan evaluasi KLHS	
	2.11.02.1.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (Dokumen)	2,00	7,27	363,71				
	2.11.02.1.02.0005			Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.02.1.02.0006			Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Pencapaian pencegahan, penganggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Persen)	71,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan pada triwulan I, karena adanya perubahan anggaran (efisiensi) sehingga pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan II, dan ekatalog versi 6 masih belum dapat diproses	Persiapan pelaksanaan kegiatan pada triwulan II dengan mempersiapkan kelengkapan pengadaan alat Passive Sampler dan dokumen kontrak pengujian kualitas air sungai dan laut	
	2.11.03.1.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (dokumen)	3,00	2,65	88,20				
	2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3,00	0,00	0,00				
	2.11.03.1.01.0005			Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	8,00	0,00	0,00				
	2.11.03.1.01.0007			Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	8,00	0,00	0,00				
	2.11.03.1.01.0009			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan In (Lokasi)	14,00	0,00	0,00				
	2.11.03.1.01.0011			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
					Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Persen)	14,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Tidak ada target pada triwulan I namun pada triwulan I telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota terkait perhitungan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	Persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target triwulan II	
	2.11.04.1.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi (persen)	100,00	13,53	13,53				
	2.11.04.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
					Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I untuk progam ini adal 0 (nol). Namun Triwulan I ini telah dilaksanakan Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan terdapat pembinaan pengelolaan limbah B3. namun terdapat efesiensi pada perjalanan dinas sebanyak 50 persen. sehingga pembinaan pengelolaan limbah B3 kurang optimal	akan dilakukan coaching klinik pengelolaan limbah B3 pada triwulan II, walaupun ada efesiensi perjalanan dinas 50 Persen. tetapi bimtek coaching klinik tidak terkena efesiensi anggaran	
	2.11.05.1.01			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (dokumen)	2,00	4,20	210,00				
	2.11.05.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha (Dokumen)	5,00	1,00	20,00				
	2.11.05.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
					Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 90 % pada Triwulan IV Pada Triwulan I telah dilaksanakan pengawasan penaatan lingkungan hidup kepada 11 usaha dan/atau kegiatan.	langkah awal yang diambil adalah melakukan pelaksanaan pengawasan penaatan lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan pada Triwulan II secara optimal	
	2.11.06.1.01			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Persen)	100,00	9,27	9,27				
	2.11.06.1.01.0006			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	120,00	9,00	7,50				
	2.11.07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (Persen)	11,76	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol), namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan verifikasi proposal dan Koordinasi awal dengan MHA	Tindak lanjut yang akan dilakukan di triwulan II yaitu pelaksanaan Sosialisasi dan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan ke MHA	
	2.11.07.1.02			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampinga (lembaga)	4,00	0,00	0,00				
	2.11.07.1.02.0001			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan (Dokumen)	4,00	0,00	0,00				
	2.11.08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
					Presentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol), namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan rapat bulanan rutin bidang membahas pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Tindak lanjut yang akan dilakukan di triwulan II yaitu pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup dalam rangka Peringatan Hari LH Tahun 2025	
	2.11.08.1.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	2.11.08.1.01.0003			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	50,00	0,00	0,00				
	2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2,00	0,00	0,00				
	2.11.09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
					Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaga/7)	68,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I program ini adalah 0 (nol), namun dalam triwulan I telah dilaksanakan kegiatan pemberian sertifikat penghargaan adiwiyata tahun 2024 dan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kanwil Kemendag terkait Penilaian Adiwiyata tahun 2025	Pada Triwulan II akan dilakukan kegiatan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2025	
	2.11.09.1.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Lembaga/)	68,00	0,00	0,00				
	2.11.09.1.01.0001			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	75,00	0,00	0,00				
	2.11.10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100 % pada Triwulan IV Pada Triwulan I, telah diselesaikan 5 pengaduan.	Langkah awal yang diambil adalah penyelesaian pengaduan secara optimal, pengaduan yang belum tertangani dilakukan pemetaan dan klasifikasi berdasarkan urgensi, lokasi, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.	
	2.11.10.1.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (Persen)	100,00	5,94	5,94				
	2.11.10.1.01.0003			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi (Perkara)	20,00	2,00	10,00				
	2.11.10.1.01.0007			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	20,00	1,00	5,00				
	2.11.11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
					Persentase penanganan sampah sesuai kewenangan provinsi (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Triwulan I untuk progam ini adal 2 rapat kegiatan. triwulan I ini telah dilakukan Bimtek Pengisian Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dan Rapat IKPS (Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) dengan peserta dari kab/kota, namun berdasarkan hasil rapat, masih ada beberapa kab/kota yang belum melengkapi data di SIPSN	akan dilakuan rapat IKPS di triwulan II. data tersebut di ambil dari SIPSN	
	2.11.11.1.01			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Persen)	100,00	2,84	2,84				
	2.11.11.1.01.0013			Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)	303,00	0,00	0,00				
	2.11.11.1.01.0014			Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (Persen)	25,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Target Trwulan I untuk Program ini adalah 0 (nol). Namun untuk mendukung ketercapaian Program Pengelolaan Hutan telah dilaksanakan Konsultasi, koordinasi dan monitoring di setiap kegiatan terkait dengan Pengelolaan Hutan. selainitu telah dilaksanakan juga Rapat persiapan untuk Penyusunan Reencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnTL) Lingkup Provinsi Banten dan rapat Fasilitasi Tindak Lanjut untuk Penyelesaian Pengudaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kab. Lebak	Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan target dan anggaran kas yang tersedia	
	3.28.03.1.02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (dokumen)	2,00	13,02	651,09				
	3.28.03.1.02.0001			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Dokumen)	3,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (dokumen)	1,00	5,67	567,00				
	3.28.03.1.03.0001			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.28.03.1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya dokumen rencana Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Persen)	1,00	11,29	1.129,00				
	3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.06			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi (Unit)	19,00	1,12	5,92				
	3.28.03.1.06.0006			Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi (Unit)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Unit)	22,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.07			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Per (Unit)	2,00	0,39	19,68				
	3.28.03.1.07.0005			Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneanaan Sanksi Adminsitratif (Unit)	301,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.07.0006			Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Unit)	10,00	0,00	0,00				
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun (Persen)	28,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	triwulan satu persiapan, target kinerja pada triwulan 2,3 dan 4	rencana kegiatan triwulan 2 : 1. pembinaan masyarakat pengelolaan daerah penyangga dikawasan bernilai ekosistem penting di kab.Serang, Kab.Lebak dan Kab.Pandeglang 2. pemberian bibit kepada kelompok masyarakat 3. monitoring dan evaluasi	
	3.28.04.1.03			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Persen)	100,00	0,96	0,96				
	3.28.04.1.03.0006			Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Ha)	40,00	0,00	0,00				
	3.28.05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
					Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok)	52,00	2,00	3,85	SANGAT RENDAH	Sampai dengan Triwulan 1, sudah terealisasi kegiatan monitoring dan pembinaan kepada 2 kelompok masyarakat, sesuai dengan target pada triwulan 1. Kelompok tersebut adalah KTH Wana Lestari di Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak dan Kelompok Mangrove Segara Biru di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.	Untuk target triwulan 2 sebanyak 30 kelompok, kami akan melakukan kegiatan pembinaan terhadap kelompok tani hutan berupa kegiatan bimtek dan pemberian bantuan bibit, serta akan dilaksanakan bimtek bagi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat.	
	3.28.05.1.01			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Persen)	100,00	1,06	1,06				
	3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	13,00	0,00	0,00				
	3.28.05.1.01.0004			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas (Orang)	60,00	0,00	0,00				
	3.28.05.1.01.0008			Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Hektar)	25,00	0,00	0,00				
	3.28.06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
					Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun (Persen)	20,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Realisasi program Pengelolaan Derah Aliran Sungai (DAS) baru dapat dihitung pada Triwulan IV, karena merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pada program pengelolaan DAS. Dimana Pada Triwulan I kegiatan yang telah dilaksanakan adalah rapat persiapan pelaksanaan sub kegiatan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS serta kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2025.	Adapun untuk Triwulan II akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu : Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kegiatan pengelolaan DAS pada Bulan April (Kabupaten Lebak), Bulan Mei (Kabupaten Pandeglang) dan pada Bulan Mei (Kabupaten Serang) serta Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS pada Bulan Mei. untuk perhitungan realisasi program tetap baru dapat dihitung pada triwulan IV	
	3.28.06.1.01			Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Persen)	100,00	1,08	1,08				
	3.28.06.1.01.0004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang)	830,00	0,00	0,00				
	3.28.06.1.01.0005			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Lembaga)	1,00	0,00	0,00				
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	10,00	10,00	SANGAT RENDAH	Pelaksanaan kegiatan triwulan I sudah dilaksanakan sesuai rencana angkas akan tetapi realisasi keuangan belum terhitung kedalam LRA.	Koordinasi dengan sub bagian keuangan dan PEP	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerahpada CDLHK Lebak Tangerang (Persen)	100,00	9,30	9,30				
	2.11.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00				
	2.11.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00				
	2.11.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.11.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (Persen)	100,00	75,66	75,66				
	2.11.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang (persen)	100,00	96,66	96,66				
	2.11.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17,00	0,00	0,00				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang (Ha)	2.500,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	- Terdapat Aktifitas pada Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat yang diefesiensi/tidak dilaksanakan Sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL Tahun 2025	- berkoordinasi dengan Perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov Banten - Menyesuaikan Target capaian kegiatan dan Sub Kegiatan melalui Pergeseran Anggaran 2025	
	3.28.03.1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT) (Persen)	100,00	1,33	1,33				
	3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	760,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	3,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.07			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)	1,00	5,00	500,00				
	3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan BPBHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Kelompok)	12,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	- Terdapat Aktifitas pada Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi yang diefesiensi/tidak dilaksanakan Sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL Tahun 2025	- berkoordinasi dengan Perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov Banten - Menyesuaikan Target capaian kegiatan dan Sub Kegiatan melalui Pergeseran Anggaran 2025	
	3.28.04.1.02			Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Le (Laporan)	1,00	5,50	550,00				
	3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.03			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT) (Persen)	100,00	3,27	3,27				
	3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Orang)	75,00	0,00	0,00				
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	16,86	16,86	SANGAT RENDAH	LRA tidak sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan	Realisasisesuai dengan anggaran kas dan melakukan koordinasi dengan bidang keuangan DLHK Provinsi Banten	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon (Persen)	100,00	14,76	14,76				
	2.11.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	0,26	26,00				
	2.11.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	0,25	25,00				
	2.11.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	0,99	99,00				
	2.11.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00	0,34	34,00				
	2.11.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	4,00	33,33				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC (Persen)	100,00	16,30	16,30				
	2.11.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC (Persen)	100,00	13,95	13,95				
	2.11.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9,00	3,00	33,33				
	2.11.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26,00	10,00	38,46				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi seluas 2.500 Hektar pertahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Ha)	2.500,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	1. Target triwulan I untuk program pengelolaan hutan adalah 0 (nol), tetapi dalam triwulan I sudah dilaksanakan kegiatan survei calon lokasi untuk kegiatan KBD, pemeliharaan sumber mata air, pembangunan hutan rakyat, rehabilitasi mangrove dan KBD Mangrove. 2. Terdapat aktifitas kegiatan pada sub kegiatan Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara dan sub kegiatan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan yang di efisiensi sehingga mempengaruhi target capaian kegiatan RHL TA. 2025	1. Koordinasi dengan perencanaan DLHK dan BAPPEDA prov. Banten 2. Menyesuaikan target capaian kegiatan dan sub kegiatan melalui pergeseran anggaran 2025	
	3.28.03.1.04			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC) (Persen)	100,00	0,98	0,98				
	3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	774,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	6,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.07			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon (Kelompok)	12,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Anggaran di geser ke Triwulan IV sesuai arahan peneliti	Mengikuti arahan peneliti	
	3.28.04.1.02			Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pa (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.03			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC) (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Orang)	50,00	0,00	0,00				
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Laboratorium Lingkungan										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	12,83	12,83	SANGAT RENDAH	Keg Adum Perangkat Daerah pada TW I Instalasi Listrik/Penerangan (triwulan I 1 paket) Perlengkapan Kantor (triwulan I 3 paket) Logistik Kantor (triwulan I 1 paket) Koordinasi dan Konsultasi SKPD (triwulan I 2 laporan) Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (triwulan I 3 unit) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (triwulan I 19 unit)	Triwulan II yang dilaksanakan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Kalibrasi Alat-alat Laboratorium, Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Lab Lingkungan (Persen)	100,00	16,55	16,55				
	2.11.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00				
	2.11.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6,00	3,00	50,00				
	2.11.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3,00	1,00	33,33				
	2.11.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	2,00	16,67				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan (Persen)	100,00	6,01	6,01				
	2.11.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10,00	2,00	20,00				
	2.11.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	45,00	18,00	40,00				
	2.11.03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
					Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan (Persen)	22,50	6,59	29,29	SANGAT RENDAH	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator program persentase peningkatan fungsi laboratorium lingkungan, pada triwulan I : - Pengambilan contoh uji yang telah dilakukan pada triwulan I sebanyak 39 paket dengan target tahun 2025 sebanyak 124 paket. - Sosialisasi Pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan dengan mengundang Instansi Kab/Kota, melakukan pembayaran registrasi iuran tahunan keanggotaan	Triwulan II dilaksanakan : - Pengambilan sampel triwulan II sebanyak - Sosialisasi pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan pada pelaku usaha / dan atau Kegiatan - pelaksanaan rapat audit internal sebagai persiapan surveilence yang akan datang - Pembelian bahan Kimia - koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Surveillance	
	2.11.03.1.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan (Dokuman)	2,00	4,58	229,10				
	2.11.03.1.01.0004			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	250,00	39,00	15,60				
	2.11.03.1.01.0014			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	4,00	0,00	0,00				
	2.11.03.1.01.0015			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2,00	0,00	0,00				
	2.11.03.1.02			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten (Dokumen)	2,00	16,03	801,50				
	2.11.03.1.02.0001			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2,00	0,00	0,00				
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	27,51	27,51	SANGAT RENDAH	Target program di TW I sebesar 27.51 dan tercapai 27.51. Pada TW I telah dilaksanakan pembayaran listrik internet, pengadaan ATK , peralatan listrik, pembelian BBM, rapat/rapat koordinasi konsultasi dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (1 unit)	Pelaksanaan pada Realisasi TW I pada Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah dilaksanakan, namun realisasi anggaran belum seluruhnya masuk dalam LRA karena terkendala sistem di keuangan, sehingga koordinasi terus dilakukan dengan bagian keuangan. Pada TW II akan dilakukan percepatan kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 2 (3 unit), roda 4 (1 unit) dan pemeliharaan AC/komputer.	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	18,44	18,44				
	2.11.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00				
	2.11.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada (UPTD SPTH) (Persen)	100,00	25,82	25,82				
	2.11.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	3,59	3,59				
	2.11.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9,00	2,00	22,22				
	2.11.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14,00	4,00	28,57				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan										
	3.28.03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
					Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat (Persen)	90,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	target 90% jumlah bibit tanaman bersertifikat untuk rehabilitasi lahan yang dibagikan ke masyarakat baru akan dihitung di akhir tahun. Pd TW I telah dilaksanakan pemeliharaan bibit tanaman rutin di persemaian, green house dan kultur jaringan, serta telah dilaksanakan monitoring distribusi bibit.	Distribusi bibit tetap berlangsung dan akan dihitung di akhir tahun persentase bibit yang terdistribusikan., pada Triwulan II akan dilaksanakan percepatan pengambilan bibit bantuan dari BPDASHL	
	3.28.03.1.09			Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (Persen)	100,00	3,09	3,09				
	3.28.03.1.09.0002			Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (Sertifikat)	4,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.09.0003			Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan (Sertifikat)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.09.0004			Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan (Sertifikat)	3,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.09.0005			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar (Laporan)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.03.1.09.0007			Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan (Batang)	250.000,00	0,00	0,00				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.28.03.1.09.0010			Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan peggedaran benih, pengadaan dan pen (Unit)	1,00	0,00	0,00				
2	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten										
	2.11.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					Peningkatan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	1,03	1,03	SANGAT RENDAH	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai Rencana Angkas akan tetapi belum terhitung kedalam LRA. dan Kegiatan Pemeliharaan BMD dan Keg Pengadaan BMD salah satu kegiatan yang terkena Efisiensi sehingga di triwulan I sebagian kegiatan belum bisa dilaksanakan.	Koordinasi dengan Sub Bagian PEP	
	2.11.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten (Persen)	100,00	10,46	10,46				
	2.11.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00				
	2.11.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	100,00				
	2.11.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten (Persen)	100,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten) (Persen)	100,00	11,11	11,11				
	2.11.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	0,00	0,00				
	2.11.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)	100,00	1,19	1,19				
	2.11.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12,00	3,00	25,00				
	2.11.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	18,00	3,00	16,67				
2	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
2.1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN										
		UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten										
	3.28.04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
					Persentase Pengelolaan TAHURA Banten (Persen)	100,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	Pada triwulan 1 telah dilaksanakan rapat-rapat persiapan, koordinasi dan konsultasi, persiapan lahan dan media tanam, serta patroli pengamanan	Pada triwulan 2 melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah disusun.	
	3.28.04.1.01			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (Persen)	100,00	8,98	8,98				
	3.28.04.1.01.0006			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti (Permohonan)	60,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.01.0007			Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.01.0008			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	4,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.01.0011			Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan (Dokumen)	2,00	0,00	0,00				
	3.28.04.1.01.0014			Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem (Ha)	12,50	0,00	0,00				
	3.28.04.1.01.0015			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan (Operasi)	48,00	12,00	25,00				
	3.28.04.1.01.0016			Penataan kawasan Tahura Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi (Dokumen)	1,00	0,00	0,00				

SERANG,Maret 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

WAWAN GUNAWAN,Sos, M.Si
NIP.196712171988031006